



Dok. GKTV

PERAYAAN HARI BURUH DI SEMARANG



LAPORAN UTAMA
Mengenal Lebih Dekat
Capres dan Cawapres 2019

LIPUTAN KHUSUS
Peraturan Rektor UNDIP No.15 Tahun 2017
Persulit Mahasiswa Angkatan 2017 ke Bawah Cumlaude?



Tahun ini menjadi tahun politik bagi negara Indonesia. Pemilu 2019 sudah semakin dekat. Tidak hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden tetapi juga untuk pemilihan calon legislatif. Kita sebagai Warga Negara Indonesia harus turut ikut andil dalam pesta demokrasi terbesar ini, apalagi melihat jumlah kaum milenial (dimana mahasiswa juga termasuk di dalamnya) saat ini yang sangat besar yakni sekitar 35-40% dari total jumlah pemilih di Indonesia. Tetapi sebagai seorang pemilih, kita harus memastikan bahwa kita tidak salah pilih karena pilihan kita akan mempengaruhi masa depan bangsa kita kedepannya. Makadari itu, Replik Edisi April ini akan memperkenalkan kalian lebih dekat dengan kedua paslon yang akan bertanding di pemilu tahun ini. Setelah mengenal dan memastikan pilihanmu, gunakanlah hak suaramu! Karena suara mahasiswa dalam pesta demokrasi ini sangatlah penting sesuai dengan perbincangan kita dengan Iran Raksa Hidayat dalam rubrik bincang.

Replik Edisi April ini juga akan membahas tentang problematika golput yang terus meningkat tiap tahunnya. Sebenarnya apa alasan sebagian masyarakat Indonesia memilih untuk golput? Temukan jawabannya di Rubrik Pro Kontra yang akan membahas tentang pro dan kontra dari golongan putih. Selagi memikirkan masa depan bangsa kita dengan memilih pemimpin baru, tentu pikiran kita tidak boleh penuh dengan beban dan memerlukan hiburan. Makadari itu, Rubrik Pojok Kota akan mengenalkan kalian kepada tempat wisata alam di Semarang yang sangat indah dan sejuk. Masih banyak rubrik-rubrik lain yang menarik dan menanti kalian untuk dibaca.

Tak lupa mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Replik Edisi April ini dan banyak terima kasih kepada reporter yang telah berkontribusi penuh dalam pembuatan Replik Edisi April ini. Akhir kata, selamat menikmati teruntuk kalian para pembaca. Semoga Replik Edisi April ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan meningkatkan jiwa kritis serta kepedulian kita terhadap bangsa dan negara kita tercinta. Salam semangat juang pers mahasiswa!

redaktur pelaksana

COVER

Cover & Layouter

Gayatri Dyah Rahmandita



STRUKTUR ORGANISASI

PEMIMPIN UMUM Daris Jaka
 SEKERTARIS UMUM Widi Dwi
 BENDAHARA UMUM Krisna Julianti
 DEWAN REDAKSI Haedar Ibnu,
 Khairunnisa, Elizabet, Ray Habib, Ricki,
 Satya Adi, Meilia Peranginangin
 PEMIMPIN REDAKSI Zidney Ilma
 SEKERTARIS REDAKSI Putri Andika
 REDAKTUR ARTISTIK Gayatri Dyah
 STAFF Hilmi, Audrey
 REDAKTUR FOTOGRAFI & GKTV Kornel
 STAFF Dwi Retno
 REDAKTUR PELAKSANA MAJALAH Aji,
 Kahargian
 REDAKTUR PELAKSANA JURNAL
 Hayyu Qomaryah, Annisa nuralam
 REDAKTUR PELAKSANA REPLIK Adita
 Lembana
 REDAKTUR PELAKSANA BUKU Adinda
 Intan
 REDAKTUR PELAKSANA TABLOID
 Fanisya
 REDAKTUR PELAKSANA MEDIA
 ONLINE Reza Aditya, Stefani
 Yulindriani
 PEMIMPIN PERUSAHAAN Carlos
 Bonardo
 MANAGER RUMAH TANGGA Apri Adi
 MANAGER IKLAN DAN PROMOSI Sindi
 Rayhananda
 MANAGER PRODUKSI DAN
 DISTRIBUSI mardiansyah
 STAFF PERUSAHAAN Aliyah. Naomy,
 Indah, Anin, Fahmi, Maufah
 PEMIMPIN LITBANG Faldy Tiesta
 KASUBDIV SURVEY & OLAH DATA
 Nurul Aini
 KASUBDIV RISET & KAJIAN Mario
 Julyano
 STAFF LITBANG Yuda, Sarah, Rico,
 Tika, Nico, Luthfi, Bob
 PEMIMPIN PSDM Rafia Alfiantoro
 STAFF PSDM Dinas, Ayu, Yulia, Devita,
 Aji, Bagus, Ayudya, Crystania, Zulfiyar,
 Rizka, Rizky, Nining, Dinda
 PEMIMPIN HUMAS Genio Krisna
 KASUBDIV INTERNAL Rudy Afriansyah
 KASUBDIV EXTERNAL M. Wildan
 STAFF HUMAS Zhafira, Icha, Inri,
 Yusron, Gloria, Dimas C, Hima

DAFTAR ISI

- 1** Laporan Utama : Menenal Lebih Dekat Capres dan Cawapres Pemilu
8 Liputan Khusus : Peraturan Rektor Undip No. 15 Tahun 2017 Mempersulit Mahasiswa Angkatan 2017 ke Bawah Cumlaude?
12 Hukum : Menguak Urgensi di Tengah Polemik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
15 Iklan Layanan Masyarakat
17 Pro Kontra : Fenomena Golput di Kala Pemilu
20 Opini : Bedah Pelaksanaan Debat Capres dan Cawapres di Indonesia
23 Bincang : Pentingnya Peran Mahasiswa dalam Pesta Demokrasi
26 Pojok Kota : Pesona Kemegahan Kalipancur, Air Terjun Tertinggi di Ujung Selatan
29 Suara Mahasiswa : Suara Milenial, Suara Penentu Arah Demokrasi Bangsa
32 Ekstra : Fakta-Fakta Unik Pemilu 2019

Mengenal Lebih Dekat Capres dan Cawapres Pemilu 2019

Indah Sari Pramono dan Yulia Andriyani



https://id.wiki.org/wiki/Joko_Widodo

Tahun 2019 merupakan tahun politik bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada dua pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden yang maju untuk memimpin negara dalam 5 tahun ke depan. Paslon tersebut ialah Jokowi-Ma'ruf Amin yang mendapat nomor urut 01 dan Prabowo-Sandiaga

mendapat nomor urut 02.

Paslon 01 : Ir.H Joko Widodo dan Ma'ruf Amin

Calon presiden (capres) nomor urut 01 yaitu [Ir. H. Joko Widodo](#), merupakan [Presiden ke-7 Indonesia](#) yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Jokowi lahir di Surakarta pada tanggal [21 Juni 1961](#). Beliau merupakan

anak sulung dan satu-satunya putra dari empat bersaudara. Jokowi berasal dari keluarga yang sangat sederhana, bukan berasal dari keluarga bergelimang harta. Dengan kesulitan hidup yang dialami, beliau terpaksa berdagang, mengojek payung, dan jadi kuli panggul untuk mencari sendiri keperluan sekolah dan uang jajan sehari-

hari. Mewarisi keahlian bertukang kayu dari ayahnya, Jokowi mulai bekerja sebagai pengrajin kayu pada usia 12 tahun. Jokowi kecil telah mengalami penggusuran rumah sebanyak tiga kali. Penggusuran tersebut mempengaruhi cara berpikir dan kepemimpinannya di kemudian hari setelah menjadi Wali Kota [Surakarta](#) saat harus menertibkan permukiman warga. Tetapi, dengan segala keterbatasan dan kekurangannya tidak menjadikan hal itu sebagai masalah. Setelah lulus SD, Jokowi kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta. Ketika lulus SMP, melanjutkan pendidikannya ke SMA Negeri 6 Surakarta. Dengan kemampuan akademis yang dimiliki, kemudian diterima di Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan UGM. Kesempatan ini dimanfaatkan untuk belajar struktur kayu, pemanfaatan, dan teknologinya. Oleh karena itu, setelah menjadi sarjana, Jokowi menekuni profesinya sebagai pengusaha mebel. Jokowi mengawali karier politiknya dengan mencalonkan diri sebagai Wali Kota Surakarta tahun 2005, diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

(PDI-P) dan [Partai Kebangkitan Bangsa](#) (PKB). Dengan terpilihnya Jokowi, yang bermodal pengalaman di masa muda, beliau mengembangkan dan menginginkan Solo menjadi lebih baik dalam hal penataan dan ketertiban. Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami banyak perubahan yang lebih baik, beberapa diantaranya adalah kehadiran Bus Batik Solo Trans, penataan kawasan jalan dan pasar, relokasi pedagang kaki lima, solo menjadi tuan rumah di berbagai acara internasional dan lain sebagainya. Selain itu, Jokowi juga terkenal akan pendekatannya dalam merelokasi pedagang kaki lima. Berkat pencapaiannya ini dan setelah 5 tahun memerintah di Kota Solo, pada tahun 2010 beliau [terpilih lagi](#) sebagai Wali Kota Surakarta dengan suara melebihi 90%. Namun, pada periode tersebut Jokowi tak menyelesaikan jabatannya dengan penuh. Pada tahun 2012, Jokowi maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2012. Pada kontestasi Pilgub tersebut Jokowi berhasil menjadi Gubernur DKI Jakarta bersama Basuki Tjahaja Purnama sebagai wakilnya. Selama menjadi Gubernur,

Jokowi membuat banyak terobosan baru, seperti Kampung Deret, Kartu Jakarta Sehat, dan Kartu Jakarta Pintar. Jokowi juga memperbaiki kebersihan lingkungan yang ada.

Pada tahun 2014, Jokowi akhirnya mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden bersama pasangannya Jusuf Kalla selaku Capres dan Cawapres. Akhirnya beliau terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada periode 2014-2019. Jokowi memulai masa kepresidenannya dengan meluncurkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Jokowi mendapat sambutan hangat dan pujian ketika menyampaikan pidato di hadapan peserta peringatan ke-60 tahun Konferensi Asia Afrika. Di bidang infrastruktur, beliau telah memulai banyak proyek pembangunan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam sektor tersebut, diantaranya adalah membangun Jalan Tol Trans-Sumatera, Tol Solo-Kertosono, pelabuhan Makassar, dan lain sebagainya. Jokowi pun memberikan perhatian khusus terhadap Papua. Memasuki akhir periode 2014-

2019 ini, Jokowi kembali maju sebagai capres petahana dan dalam pemilu kali ini yang menjadi pasangan cawapresnya adalah Prof. Dr. K. H. Ma'ruf Amin. Beliau lahir di [Kresak, Tangerang](#) pada tanggal 11 Maret 1943. Ma'ruf Amin merupakan ulama dan politikus Indonesia. Beliau memulai kariernya di dunia dakwah dari bawah. Tak hanya itu, Ma'ruf Amin juga menjalani dunia politik. Keilmuan agama dan wawasan kebangsaan yang dimiliki mengantarkannya menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Ma'ruf Amin lahir dalam tradisi Nahdlatul Ulama (NU). Keluarganya kemudian menyekolahkan ke Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Setelah lulus pondok, beliau meneruskan kuliah di Universitas Ibnu Chaldun, Bogor. Kiprah Ma'ruf dalam dunia politik diantaranya adalah pernah menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta utusan golongan untuk 1971-1973. Kemudian menjadi anggota DPR dari PPP pada tahun 1973 hingga 1977. Saat menjabat menjadi anggota DPR, Ma'ruf pernah menjadi pimpinan Komisi A dari Fraksi PPP.

Kemudian Ma'ruf ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), beliau merupakan anggota MPR pada 1997-1999. Selanjutnya dia terpilih menjadi anggota DPR dari Fraksi PKB selama 1999-2004. Ma'ruf pernah menjabat sebagai ketua Komisi VI DPR. Dia juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro PKB pada tahun 1998. Namanya mulai terkenal bersamaan lahirnya Era Reformasi, pada tahun 1998, dengan bermunculan partai-partai baru. Ma'ruf Amin sempat diminta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk menjadi Ketua Dewan Syuro PKB yang pertama. Melalui partai yang identik dengan penokohan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini, Ma'ruf pernah menjadi anggota DPR/MPR RI. Panasnya dinamika politik di PKB dan nasional, beliau memilih konsentrasi ke ormas Islam NU dan MUI. Ma'ruf pun menjalaninya dengan khidmat. beliau termasuk menjadi salah satu pengurus NU dan juga aktif di Komisi Fatwa MUI. Selain itu, di tengah menjalani aktivitasnya di NU dan MUI, beliau diminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden

selama periode 2007-2009 dan 2010-2014, semenjak saat itu karier Ma'ruf Amin naik. Di NU sendiri, beliau diberi amanah sebagai Rais Aam (Ketua Umum) Syuriah PBNU periode 2015-2020, sementara di MUI yang sebelumnya sebagai Ketua Komisi Fatwa, sekarang beliau diberi tugas sebagai Ketua Umum MUI periode 2015-2020. Keilmuan Ma'ruf Amin pun tak perlu diragukan lagi. Ada sejumlah janji yang disampaikan Jokowi-Ma'ruf dalam debat kedua Pilpres 2019, misalnya Program Indonesia Timur Terkoneksi yaitu Indonesia dalam waktu dekat akan menjadi negara dengan konektivitas data terbaik, Digitalisasi Dorong Usaha yaitu Jokowi berjanji memicu kemajuan digital terutama dalam membangun bisnis startup dan skala kecil, Bahan Bakar Biodisel yaitu dalam masa pemerintahannya Indonesia telah memicu pengembangan biodiesel berbasis kelapa sawit, Lahan untuk Masyarakat yaitu membagikan konsesi pada masyarakat, Infrastruktur Maritim yaitu mengunggulkan program bank mikro, dan hadirnya 1000 Unicorn yaitu berjanji mendukung ekonomi

untuk pengembangan startup dan usaha kecil.

Paslon 02 : Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno

Pasangan calon nomor urut 02 diisi oleh Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden. Calon presiden yang memiliki nama lengkap serta gelar Letnan Jenderal (Purn.) H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo ini lahir di Jakarta, 17 Oktober 1951. Prabowo merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Ayahnya bernama Soemitro Djojohadikusumo dan ibunya bernama Dora Soemitro. Ayahnya adalah seorang pakar ekonomi dan politikus yang pernah menjabat sebagai Menteri Negara Riset Indonesia pada tahun 1973-1978. Prabowo juga merupakan cucu dari Margono Djojohadikusumo yaitu pendiri Bank Negara Indonesia. Semasa kecil, Prabowo mengenyam pendidikan di luar negeri. Pendidikan dasarnya hanya ditempuh selama 3 tahun di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia. Kemudian melanjutkan ke bangku menengah di Zurich International School di Zurich, Jerman pada

tahun 1963-1964. Terakhir beliau meneruskan di The American School in London pada tahun 1964-1967. Tiga tahun kemudian, beliau memilih untuk pulang ke Tanah Air dan melanjutkan pendidikannya di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Prabowo terlahir dari keluarga yang berada dan berpendidikan. Meski berasal dari darah seorang ekonom dan pebisnis, tidak membuatnya untuk langsung terjun ke dunia tersebut. Prabowo lebih memilih untuk menekuni dunia militer yang kemudian membawanya pada tingkat Letnan Jenderal. Pada tahun 1974, Prabowo lulus dari pendidikan Akmil dan ditugaskan pada Operasi Timor Timur sebagai Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha) dua tahun kemudian. Di usianya yang terbilang cukup muda, beliau telah diamanatkan untuk memimpin operasi tersebut. Prabowo menjalankan misi operasi tersebut dengan baik, beberapa tahun kemudian beliau diberi kepercayaan kembali sebagai Wakil Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Teror Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Prabowo telah

menghabiskan hidupnya di dunia militer dengan menjabat sebagai Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad (1991-1993), Komandan Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Panglima Komando Cadangan Strategi TNI AD (Pangkostrad) serta Komando Sekolah Staf dan Komando Abri (1998). Kemudian, karir militer yang tekunnya sejak tahun 1976 diberhentikan pada tanggal 22 Mei 1998 oleh Presiden B.J. Habibie. Setelah diberhentikan, Prabowo memfokuskan diri pada dunia bisnis. Beliau berhasil memiliki sekaligus memimpin sebanyak 27 perusahaan di Indonesia. Dilihat dari perjalanan karirnya di dunia militer dan bisnis, menunjukkan bahwa beliau adalah sosok yang sangat nasionalis sebagai abdi negara serta tekad yang amat kuat dan ambisius sebagai seorang pebisnis.

Prabowo pun memiliki rekam jejak dalam bidang politik, yakni pernah mencalonkan diri sebagai calon presiden pada pemilu tahun 2004 yang diusung oleh Partai Golkar, namun dikalahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kemudian beliau mendirikan Partai Gerindra



<https://news.detik.com/kolom/d-4388408/tema-pelanggaran-ham-dalam-debat-capres-2019>

bersama adiknya dan menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina. Pada pemilu tahun 2014, Prabowo mencalonkan dirinya kembali, namun pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang memenangkan pemilu tersebut.

Pada tahun 2019 ini, Prabowo mencalonkan diri kembali dengan menggandeng Sandiaga Uno sebagai cawapresnya. Nantinya, Pemilihan Presiden (Pilpres) tersebut akan diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019. Pemilu tahun ini pun menjadi kesempatan pertama yang diberikan kepada Sandiaga Uno. Calon wakil presiden yang

digandeng oleh Prabowo ini lahir di Pekanbaru, 28 Juni 1969 dan memiliki nama lengkap serta gelar H. Sandiaga Salahuddin Uno, B.B.A., M.B.A.. Sandi adalah seorang pengusaha dan politikus. Saat kecil, Sandiaga Uno terkenal cerdas dan bersekolah di SD PKSD Bulungan. Keluarganya kemudian pindah ke Jakarta, Sandi melanjutkan sekolahnya di SMP 12 Wijaya Jakarta dan SMA Pangudi Luhur Jakarta. Setelah lulus SMA, beliau berhasil melanjutkan pendidikannya ke jenjang Strata-1 dengan jurusan Administrasi Bisnis di Wichita State University, Amerika Serikat.

Kemudian beliau bekerja di salah satu bank selama setahun sebagai karyawan.

Namun, Sandiaga memilih untuk melanjutkan Strata-2 dengan jurusan Administrasi Bisnis di George Washington University, Amerika Serikat, namun kali ini dengan biaya beasiswa. Dua tahun kemudian, beliau lulus dengan IPK 4,0. Setelah itu, Sandi bekerja di Seapower Asia Investment Limited di Singapura sebagai manajer investasi tahun 1994. Setahun kemudian, beliau pindah ke NTI Resources Ltd di Kanada dan menjabat sebagai executive vice president. Namun

pada tahun 1997, kariernya pun terhalang oleh krisis moneter. Beliau tidak dapat melanjutkan karena kantornya bangkrut. Beliau menjadi pengangguran dan tinggal di rumah orang tuanya. Tidak tinggal diam, Sandi berusaha untuk mendirikan suatu perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang diberi nama PT. Recapital Advisor bersama dengan kawan SMA-nya. Rintangan demi rintangan yang dialaminya tidak membuatnya putus asa, banyak yang meremehkannya, sehingga butuh waktu 6 bulan untuk mendapat kepercayaan dari para klien. Tahun berikutnya, Sandi mendirikan perusahaan kembali yang berada di bidang investasi dengan Edwin Soeryadjaya, perusahaan itu bernama PT. Saratoga Investama Sedaya. Perusahaan berjalan sukses karena adanya jaringan-jaringan yang terbentuk sebelumnya. Dari seseorang yang pernah mengalami pengangguran, sekarang beliau menikmati hasil kerja kerasnya selama ini. Sandi juga menjadi

CEO di beberapa perusahaan besar seperti PT Adaro Indonesia, PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia, dan PT. Iforte Solusi Infotek.

Sandiaga pun berkecimpung di dunia politik, beliau pernah menjadi Tim Pemenangan Pemilu Partai Gerindra. Pada tahun 2017, beliau diusung oleh Partai Gerindra dan koalisinya PKS untuk dicalonkan sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta bersama Anies Baswedan. Pada pilgub tersebut, beliau dan pasangannya berhasil menang. Belum lama menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandi yang terkenal dengan program "One Kecamatan One Center Entrepreneurship" (OK OCE) ini kemudian dipilih oleh Prabowo Subianto untuk menjadi calon wakil presiden di Pilpres 2019.

Pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno membentuk lima fokus program kerja nasional. Pertama, ekonomi yang mengutamakan rakyat, adil, makmur, berkualitas dan

berwawasan lingkungan, salah satu penjabarannya adalah menciptakan lapangan kerja untuk rakyat. Kedua, Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial, yaitu perbaikan gaji guru honorer dan tenaga kesehatan. Ketiga, Memastikan keadilan hukum dan menjalankan demokrasi yang berkualitas, yakni menjamin kemerdekaan berserikat dan mengeluarkan pendapat serta kebebasan pers. Keempat, menjadikan Indonesia rumah yang aman dan nyaman bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima, penguatan karakter dan kepribadian bangsa, yaitu melakukan proses pembangunan karakter.

VISI MISI CAPRES 2019

1



**JOKOWI
MA'RUF**

KOALISI INDONESIA KERJA

2



**PRABOWO
SANDI**

KOALISI INDONESIA ADIL MAKMUR

VISI

Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong

Indonesia adil, makmur bermatahat, religius, berdaulat dibidang politik, berdiri diatas khaki sendiri di bidang ekonomi dan berkepribadian nasional yang kuat dibidang budaya

MISI

EKONOMI

<ul style="list-style-type: none"> ● Peningkatan Kualitas Indonesia ● Ekonomi produktif ● Pembangunan Merata 	<ul style="list-style-type: none"> ● Masyarakat Cerdas ● Adil, Makmur, Berkualitas
---	--

HUKUM, PEMERINTAHAN & KEAMANAN

<ul style="list-style-type: none"> ● Peningkatan Hukum ● Perlindungan dan Keamanan Warga ● Bersih, Efektif, Terpercaya ● Sinergi Pemuda 	<ul style="list-style-type: none"> ● Transparan, Demokratis ● Bangun Sistem Pertahanan
---	--

SOSIAL & BUDAYA

<ul style="list-style-type: none"> ● Lingkungan Hidup Berkelanjutan ● Kemajuan Budaya Bangsa 	<ul style="list-style-type: none"> ● Nilai Luhur Kepribadian Bangsa
--	--



<https://ciricara.com/2013/02/13/apa-arti-cum-laude/>

Peraturan Rektor Undip No.15 Tahun 2017 Persulit Mahasiswa Angkatan 2017 ke Bawah Cumlaude?

Gloria Masniar dan Galih Aji Pangestu

Seorang mahasiswa memiliki tanggungjawab moril untuk menyelesaikan masa studinya dengan baik. Salah satu hal yang masih sering dipandang oleh masyarakat umum untuk menilai apakah seorang mahasiswa telah menyelesaikan masa studinya dengan baik atau tidak adalah dengan melihat

apakah kelulusannya mendapat predikat cumlaude atau tidak. Secara singkat cumlaude adalah sebuah bentuk pujian yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada mahasiswa yang berhasil lulus dengan mencapai standar akademik tertentu yang telah ditetapkan. Beberapa memiliki keyakinan keterampilan khusus lebih

penting daripada IPK, bahkan banyak yang beranggapan bahwa IPK tinggi tidak menjamin kesuksesan seseorang dalam dunia kerja sedangkan keterampilan khusus memberikan lebih banyak peluang. Terlepas dari benar atau tidaknya pendapat ini, ada keuntungan yang di miliki oleh mahasiswa dengan IPK tinggi

Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro. Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 46 ayat (8) maka bagi mahasiswa angkatan 2017 ke bawah yang memiliki nilai C pada transkrip nilainya tidak akan mendapat predikat cumlaude pada kelulusannya nanti. Predikat kelulusan pujian atau cumlaude diberikan apabila memperoleh IPK 3,51 sampai dengan 4,00 dan tidak terdapat nilai C pada transkrip, serta nilai TOEFL lebih dari 450. Dalam Pasal 46 ayat (9) juga dikatakan bahwa predikat kelulusan pujian juga ditentukan dari masa studi yang terjadwal ditambah satu semester. Sehingga adanya ketentuan tersebut ternyata memicu keresahan di kalangan mahasiswa Undip itu sendiri terutama terkait tidak boleh adanya nilai C di dalam transkrip nilai. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu mahasiswa bernama Karisya yang mengaku tidak setuju dengan adanya peraturan ini. Mahasiswa angkatan 2017 tersebut berpendapat bahwa sosialisasi

peraturan ini belum jelas dan masih abu-abu, ia mengaku hanya mengetahui tentang peraturan tersebut dari buku Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2017 saja, bukan dari sosialisasi langsung dari pihak Rektor. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa syarat ini tentunya menyulitkan mahasiswa apalagi ketika mahasiswa lulus dengan IPK 3,8 namun memiliki nilai C, malah menjadi penghalang untuk mereka mendapat predikat cumlaude. "Kalau kita ngelamar kerja pun orang gak bakal tanya nilai C nya ada berapa, tapi cumlaude apa enggak?" ucap Karisya yang tidak setuju dengan adanya batasan nilai dalam penentuan predikat cumlaude. Hal demikian menurutnya justru terkesan membatasi mahasiswa untuk mendapatkan predikat cumlaude. Untuk itu, ia berharap pihak universitas memberikan kejelasan mengenai peraturan ini langsung kepada mahasiswa ataupun melalui badan-badan kemahasiswaan yang ada di setiap fakultas, karena masih

terutama cumlaude, seperti mempermudah mendapatkan beasiswa, membantu untuk lulus pada seleksi tahap berkas pada saat pengajuan surat lamaran kerja, membawa momen bahagia pada saat wisuda, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, banyak mahasiswa yang berlomba-lomba untuk mendapatkan gelar pujian atau cumlaude ini. Setiap perguruan tinggi bahkan di tingkat fakultasnya memiliki ketentuan yang berbeda-beda dalam hal pemberian predikat cumlaude. Di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (FH Undip) sendiri juga memiliki ketentuan yang harus dicapai oleh seorang mahasiswa untuk mendapatkan predikat pujian ketika lulus. Dari tahun ke tahun, Fakultas Hukum Undip selalu mengeluarkan lulusan dengan jumlah predikat cumlaude yang terbilang cukup banyak. Namun, pada tahun 2017 terjadi perubahan mengenai ketentuan cumlaude akibat disahkannya Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Bidang



<https://www.kompasiana.com/kristalpancarwengi/56e8e2be557b615224682a93/sa-ya-lulusan-cumlaude-dan-nganggur-memangnya-kenapa>

banyak mahasiswa bahkan ada beberapa dosen yang juga masih memiliki kebingungan dengan Peraturan Rektor yang baru ini. Selain itu, ia juga berharap agar Peraturan Rektor tersebut dapat dikaji ulang apakah berdampak baik nantinya ketika mahasiswa itu sudah lulus atau malah sebaliknya yaitu merugikan mahasiswa?. Menariknya, Peraturan Rektor No.15 Tahun 2017 ini tidak hanya berlaku di kalangan Fakultas Hukum Undip saja, tetapi juga tertuju kepada seluruh fakultas lain yang ada di Universitas Diponegoro. Jika

ketentuan cumlaude ini sudah menjadi keresahan pada Fakultas Hukum itu sendiri, bagaimana kabar kawan-kawan dari fakultas lain yang lebih susah untuk mendapatkan gelar cumlaude? seperti kawan-kawan dari Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, dan fakultas-fakultas lainnya. Hal tersebutlah yang menjadi keresahan bersama sebagai mahasiswa yang ingin berjuang mendapatkan gelar cumlaude saat kelulusan nantinya. Berangkat dari keresahan itulah penulis berusaha meminta penjelasan dari dosen yang

menjabat dalam birokrasi FH Undip untuk memperjelas dan menjawab kebingungan-kebingungan yang dirasakan oleh para mahasiswa. Penulis berhasil mewawancarai Ketua Program Studi (Kaprodi) S1 Ilmu Hukum FH Undip yaitu Bapak Marjo, S.H., M.Hum. Menurutnya adanya perubahan Peraturan Rektor No.15 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro membawa implikasi adanya penyesuaian ketentuan akademik pula di FH Undip. Salah satu ketentuan yang dirubah yaitu mengenai syarat untuk mendapatkan predikat cumlaude bagi mahasiswa angkatan 2017 ke bawah adalah tidak boleh terdapat nilai C dalam transkrip nilai ketika lulus. Pak Marjo menjelaskan bahwa ketentuan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas lulusan yang dihasilkan oleh Universitas Diponegoro itu sendiri, hal ini juga ditujukan untuk menunjang target Universitas Diponegoro sendiri untuk

menuju tingkat "World Class University". Oleh karena itu diperlukan peningkatan standar akademik salah satunya yaitu kelulusan mahasiswa. Selain itu, menurut Pak Marjo ketentuan mengenai kelulusan dengan predikat cumlaude ini adalah untuk mengembalikan esensi dari predikat cumlaude itu sendiri, dimana cumlaude memiliki arti sebagai "Pujian", sehingga kurang tepat apabila seorang mahasiswa lulus dengan Pujian namun ia memiliki transkrip nilai C. Lebih lanjut lagi, Pak Marjo menegaskan bahwa menurutnya usaha peningkatan kualitas ini tidak akan membatasi jumlah mahasiswa untuk lulus dengan predikat cumlaude. Mengingat apalagi untuk Fakultas Hukum Undip itu

sendiri telah mengadakan program yang mampu mempermudah mahasiswa untuk mendapat cumlaude yaitu semester pendek atau semester antara. Sehingga bagi mahasiswa yang mendapatkan nilai C tetapi ingin mendapatkan predikat cumlaude dapat terbantu dengan mengikuti semester antara. Pak Marjo selaku Kaprodi S1 menyampaikan pesan bahwa penting bagi seorang mahasiswa untuk mendapatkan predikat cumlaude saat kelulusan nantinya. Melihat fakta lapangan kerja dimana instansi atau perusahaan yang membuka lapangan kerja bagi mahasiswa terutama yang fresh graduate ternyata memberi perhatian lebih kepada mahasiswa cumlaude daripada

yang tidak dan masih banyak manfaat-manfaat lainnya yang bisa didapatkan ketika mahasiswa lulus dengan predikat cumlaude. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa Universitas Diponegoro yang lulus dapat bersaing secara kompetitif dengan mahasiswa cumlaude yang berasal dari universitas-universitas besar lainnya di Indonesia. Oleh karena itu diharapkan pula bagi mahasiswa untuk melakukan peningkatan-peningkatan terhadap mutu diri selain melalui akademik, seperti melatih softskill melalui organisasi-organisasi maupun dengan menambah pengalaman magang.



Menguak Urgensi di Tengah Polemik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Zhafira Naura R.

Semakin meningkatnya tingkat kekerasan seksual yang ada di Indonesia setiap tahunnya, masih menjadi permasalahan terkait penanganannya. Tidak sedikit kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang mengambang tanpa solusi hukum yang jelas. Bahkan, beberapa kasus hanya berhenti sampai tahap mediasi saja. Hal ini menunjukkan

ketidakseriusan masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual. Bahkan sejak tahun 2014, Komnas Perempuan telah menyatakan Indonesia darurat kekerasan seksual. Perumusan dan penyusunan Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dimulai sejak tahun 2014 hingga tahun 2016. Pada tahun 2016, RUU PKS masuk dalam daftar

Penambahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Meski dalam kenyataannya payung hukum dalam usaha penanggulangan darurat kekerasan seksual ini sudah sangat dibutuhkan

dan sudah 3 tahun lebih berada di daftar Penambahan Prolegnas tetapi hingga saat ini RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tak kunjung disahkan. Padahal, RUU ini merupakan sebuah jalan terang dalam upaya menghapuskan tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi di negeri kita. Pemerintah, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah menyebutkan adanya urgensi dan alasan mengapa RUU ini harus segera disahkan atau direalisasikan. Dilema mengenai kekerasan seksual, terutama yang dipahami oleh aparat dan pejabat negara sering

menimbulkan kebuntuan untuk memberikan solusi yang tepat ke depannya. Termasuk dimensi yang terdapat dalam RUU PKS. Pasal 11 dalam RUU ini mengatur kekerasan seksual yang jauh lebih mendalam daripada tindak pidana semata, termasuk di dalamnya adalah pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Dimensi yang lebih luas itu ada karena regulasi pemerintah yang ada diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur secara mendalam kasus-kasus yang termasuk dalam kekerasan seksual sehingga regulasi tersebut tidak menasar pada akar permasalahannya serta minim perlindungan pada korban (Ratna Bantara Munti, Koordinator Jaringan Prolegnas pro Perempuan). Konsep ini juga berlaku tidak hanya perlindungan terhadap perempuan, tetapi anak-anak

dan laki-laki, orang dengan disabilitas, serta kelompok lainnya yang rentan akan kekerasan seksual. Kombinasi peran pemerintah dan masyarakat dalam pengentasan kekerasan seksual dalam RUU PKS dapat terlihat jelas dalam usaha pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual, mulai dari pendampingan hukum, medis, psikologis ditambah psikososial dan aspek pemulihan korban. Integrasi peran aparat sipil negara, penegak hukum, dan satuan di bawahnya dalam mengentaskan kekerasan seksual secara komprehensif dimulai dengan pemberdayaan pengetahuan yang berbasis kesetaraan gender, mendorong empati terhadap korban, serta membangun sensitivitas terhadap kasus-kasus kekerasan seksual untuk mendorong kerja aparat yang lebih serius dan mendalam. Dapat dipahami mengapa terdapat hambatan-hambatan signifikan dalam pengesahan RUU PKS ini salah satunya dengan adanya petisi online untuk menentang pengesahan

RUU PKS ini. Kontroversi yang berada di petisi online tersebut menyatakan bahwa RUU ini akan menjadi jalan liberalisasi hubungan seks bebas, dan inisiasi nilai-nilai feminisme barat yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Semangat RUU PKS yang jelas-jelas melibatkan tokoh-tokoh akademisi, lembaga kemanusiaan, advokat hukum, tokoh-tokoh pemuka lintas agama, serta elemen pemerintah maupun masyarakat setidaknya dianggap kontroversial oleh beberapa kelompok yang berseberangan dengan pengesahan RUU ini. Beberapa miskonsepsi yang terdapat dalam RUU PKS adalah dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual disebutkan bentuk kekerasan seksual adalah "pemaksaan pelacuran", sedangkan pelacuran sendiri tidak dijadikan bentuk kekerasan seksual. Padahal, dalam konteks "kekerasan" seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adalah adanya

unsur pemaksaan, jebakan, eksploitasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan/atau situasi yang tidak memungkinkan seseorang untuk menolak, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Miskonsepsi selanjutnya adalah RUU ini juga dianggap pro zina, pro aborsi, dan pro *free sex* dan Pro LGBT. Pernyataan ini tidaklah benar. Komisioner Komisi Nasional Imam Nakhae'ie menegaskan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini khusus (*lex specialis*) menangani kekerasan seksual. Terkait zina sudah diatur dalam KUHP. Begitu juga soal aborsi yang sudah diatur dalam KUHP, UU Kesehatan, hingga Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Sedangkan miskonsepsi mengenai bahwa RUU ini pro LGBT tidaklah benar, tidak ada pernyataan soal ini dalam Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Komnas Perempuan dalam Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan

Seksual menyajikan fakta kekerasan seksual yang dialami warga negara Indonesia yang didasari orientasi seksual tertentu yang apabila menggunakan prinsip hak asasi manusia setiap warga negara berhak untuk terbebas dari kekerasan atas dasar apapun. Miskonsepsi tersebut jelas salah, karena RUU ini tidak ada kaitannya dengan hal-hal atau fokus terhadap LGBT. Pro dan kontra sebenarnya wajar mengingat pengesahan RUU PKS ini bukan hal yang dianggap setengah-setengah karena ini merupakan upaya perlindungan kepada warga negara Indonesia secara keseluruhan tanpa adanya diskriminasi dan berbasis pada nilai hak asasi manusia dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya Indonesia. Kepentingan demi kepentingan memang tidak mudah dicapai dalam waktu singkat karena banyaknya pertimbangan. Terkadang beda pendapat hingga meluas terjadi karena hal-hal yang sebenarnya mudah

untuk diatasi, misalnya dengan meningkatkan kapasitas literasi untuk memeriksa ulang sumber informasi sehingga tidak terjerumus dalam lingkaran hitam sebaran kabar yang mungkin belum valid.

RUU PKS ini tidak mungkin menghilangkan semangat anti kekerasan seksual tanpa mengindahkan nilai-nilai yang sudah ada. Sekarang hanya diperlukan keinginan bersama untuk membahas isi RUU dengan komprehensif sehingga tidak akan ada penundaan lebih lama yakni jika diperlukan revisi tambahan atau sejenisnya. Karena usaha-usaha preventif dan pasca kekerasan seksual jauh lebih dinanti penanganan seriusnya dari elemen pemerintah maupun masyarakat.



Pemilihan Umum atau yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, maupun memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala hal yang berkaitan kehidupan bangsa selama beberapa tahun kedepan ditentukan dalam proses pemilihan umum yang berlangsung dengan hanya hitungan menit. Oleh sebab itu, sebagai warga negara yang berdaulat gunakan hak pilih sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa Rakyat yang ikut serta dalam Pemilu disebut dengan pemilih dengan syarat yaitu:

- Warga Negara Indonesia.
- Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara; atau
- Sudah kawin atau sudah pernah kawin.

Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara meliputi:

- Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan.
- Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan.



<http://aceh.tribunnews.com/2017/02/17/data-desk-pilkada-lhokseumae-golput-mencapai-51-ribu-orang>

Fenomena Golput di Kala Pemilu

Nurul Aini Kamal

Pesta demokrasi tinggal hitungan hari. "Pemilih berdaulat Negara Kuat" merupakan tagline pemilu serentak 2019. Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan legislatif (Pileg) 2019 akan digelar serentak pada 17 April 2019. Peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam mengawasi atau memantau jalannya proses kontestasi demokrasi merupakan hal yang

sangat penting. Pemilih merupakan unsur yang penting dalam sebuah pesta demokrasi. Jumlah pemilih adalah salah satu indikator penting bagaimana warga berpartisipasi dalam pemerintahan di sebuah negara. Pada 2004, proses pemilihan presiden dilakukan dua putaran, karena kelima pasangan belum ada yang memperoleh suara lebih dari 50 persen pada putaran pertama. Pada Pilpres putaran pertama tingkat partisipasi politik

pemilih mencapai 78,2 persen, sedangkan pada Pilpres putaran kedua tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 76,6 persen. Pada Pilpres 2009 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 71,7 persen. Dan pada Pilpres 2014 tingkat partisipasi pemilih mencapai 75,2 persen. Sebagai pemilih, tentu harus menggunakan hak pilihnya dengan sebaik mungkin karena Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat. Pemilihan Umum merupakan salah satu cara bagi rakyat untuk secara langsung berpartisipasi dan memilih Presiden maupun Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Memilih merupakan bentuk kontribusi dalam perwujudan negara yang demokratis. Jika kita tidak menggunakan hak pilih (golput), kesempatan memilih pemimpin justru akan digunakan oleh pihak lain. Akan sangat berbahaya kalau yang menggunakan hak itu justru pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena dibalik negara yang maju, terdapat rakyat yang aktif positif. Demokrasi perlu dikelola supaya

hak suara dapat mendukung lahirnya pemimpin bangsa yang mampu dan layak mengelola bangsa ini. Salah satu bukti warga negara yang baik adalah ia yang ikut bertanggungjawab (wajib) dan berhak untuk andil dalam menciptakan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana kedaulatan rakyat, dengan menggunakan hak pilih berarti kita sedang menggunakan hak untuk berpendapat dan juga memilih yang terbaik menurut kita. Jelang pemilu serentak ini mulai bermunculan fenomena-fenomena politik seperti Golput. Melihat dari sejarahnya Golongan Putih (Golput) merupakan gerakan yang muncul sebagai bentuk protes pemuda dan mahasiswa mengenai penyelenggaraan pemilihan umum pertama pada masa orde baru tahun 1971. Menurut Ekspres Edisi 14 Juni 1971 "golput adalah sebuah gerakan untuk datang ke kotak suara, dan menusuk kertas putih di sekitar tanda gambar, bukan gambarnya. Sehingga suara tersebut tidak sah dan tidak dihitung". Fenomena ini kerap terjadi di setiap pemilu. Golput terjadi karena beberapa alasan, ada yang

dikarenakan namanya tidak ada atau belum tercantum dalam pemilih tetap, tidak datang ke TPS karena ada urusan lain yang mendesak atau dalam keadaan sakit. Selain itu, masih banyak juga masyarakat yang memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya disebabkan peserta atau kontestan pemilu dianggap tidak ada yang bisa memperjuangkan aspirasi rakyat karena calon yang ada dinilai tidak memiliki kualifikasi, kredibilitas dan akseptabilitas yang sesuai harapan rakyat atau bisa disebut juga tidak puas dengan calon yang ada. Bahkan, ada juga golput yang disebabkan karena tidak mengetahui makna atau manfaat pemilu bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagian besar dari mereka juga kecewa dengan janji-janji yang tidak terlaksana. Tetapi alasan yang paling mendasari maupun yang paling menarik adalah setiap orang dalam melakukan golput adalah karena mereka menganggap bahwa tidak menggunakan hak pilih adalah hak masing-masing individu, karena tidak ada peraturan manapun yang mewajibkan mereka untuk menggunakan hak pilihnya, dan

tidak ada larangan serta hukuman bagi mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya. Perkembangan golput kian meningkat di setiap pemilihan umum baik pemilihan presiden (Pilpres) maupun pemilihan legislatif (Pileg). Pada Pilpres 2004 Putaran Pertama angka golput mencapai 21,8 persen dan menjadi 23,4 persen pada putaran kedua sedangkan angka golput pada Pileg mencapai 15,90 persen. Begitu juga dengan Pilpres dan Pileg tahun 2009 dan 2014, angka golput pada Pilpres 2009 mencapai 28,30 persen dan Pileg mencapai 29,10 persen. Pada 2014 angka golput meningkat menjadi 29,01 persen dan angka golput pada Pileg menurun menjadi 24,89 persen. Golput merupakan bentuk ekspresi politik. Dalil pembenaran logika golput dalam Pemilu di [Indonesia](#) yaitu UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43. Selanjutnya, UU No 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil Politik yaitu di Pasal 25 dan dalam UU No 10/2008 tentang Pemilu disebutkan di Pasal 19 ayat 1 yang berbunyi "WNI yang pada hari pemungutan suara telah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin



<https://medium.com/sayagolput/saya-golput-c0353fc84fc5>

mempunyai hak memilih. Dalam klausul tersebut kata yang tercantum adalah "hak" bukan "kewajiban". Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamendemen pada 1999-2002, tercantum dalam Pasal 28 E yaitu "Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali". Dengan demikian terdapat kata "bebas" yang berarti bahwa pemilih memiliki kebebasan untuk menggunakan hak suaranya sesuai hati nuraninya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Memilih ataupun tidak memilih merupakan hak setiap orang,

yang menjadi permasalahan apabila orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah maka dapat dipidana sesuai dengan pasal 515 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun terlepas dari apapun yang mendasari orang melakukan tindakan golput, dengan alasan pembenaran sebenar apapun golput adalah tindakan yang tidak

baik. Apapun itu, berkontribusi kepada bangsa dengan cara ikut memilih dalam pemilihan umum adalah jauh lebih baik dibanding memilih bersikap apatis, karena apatisisme tidak akan menyelesaikan masalah. Kemudian, siapapun yang terpilih nantinya tentu kita akan tetap berada di bawah pemerintahannya, maka apabila kita tidak ikut memilih kita akan merugi karena suara pemilih menentukan nasib bangsa.



Bedah Pelaksanaan Debat Capres dan Cawapres di Indonesia

Rudi Afriansyah

Debat merupakan suatu cara untuk mengadu argumen antara dua pihak atau lebih tentang suatu isu, seperti isu ekonomi, politik, sosial budaya, dan lain sebagainya. Tujuan dari debat ini adalah untuk mengetahui seberapa kuatnya calon presiden dan wakilnya menguasai visi maupun misi masing-masing pasangan calon capres dan cawapres. Sebelum membahas mengenai debat capres dan cawapres yang terjadi pada tahun 2019

ini, hendaknya perlu diketahui tentang awal mula debat capres ini pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Dimulai dengan eksperimen Debat Calon Presiden (Capres) RI yang pertama kali dilakukan pada Selasa, 27 April 1999, di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI), Salemba, Jakarta. Saat itu, peserta debat, Dr Amien Rais (Ketua Umum PAN), KH Didin Hafidhuddin (Partai Keadilan), Dr Sri Bintang Pamungkas (Ketua Umum PUDI) dan Dr Yusril Ihza Mahendra

(Ketua Umum PBB), secara legal sebenarnya belum bisa dikatakan sebagai calon presiden RI. Debat tersebut juga merupakan eksperimen karena acara tersebut diselenggarakan bukan oleh lembaga formal seperti KPU, namun sekedar diselenggarakan oleh mahasiswa UI dalam wadah mahasiswa "Forum Salemba". Walaupun acara debat tersebut diselenggarakan secara sederhana, namun dibalikny ada cita-cita besar untuk mendorong proses

demokratisasi di negeri kita. Acara ini secara sengaja dibuat sebagai rintisan membuka jalan baru bagi berkembangnya budaya politik baru di Indonesia yang transparan dan akuntabel. Kemudian, dilansir dari Harian Kompas edisi 21 April 2004, debat pilpres pertama kali terjadi pada Pilpres 2014. Saat itu, untuk kali pertama dalam sejarah politik modern di Indonesia, seorang presiden dan wakil presiden akan dipilih langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, perlu untuk mengenalkan visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Meski telah berlangsung beberapa kali debat dalam beberapa kontestasi Pemilihan Presiden di Indonesia, masih banyak persepsi bahwa kehadiran debat calon presiden dianggap tak memiliki kaitan langsung dengan masyarakat pemilih dan tak memiliki fungsi dalam proses penentuan pilihan pemilih calon presiden yang berdebat. Namun, acara debat ini tetap diselenggarakan juga

dan menjadi tontonan menarik masyarakat luas. Ajang debat ini tentunya ditunggu-tunggu oleh masyarakat sebagai pertimbangan dalam memilih siapa yang pantas untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia. Seperti diketahui bersama, bahwa di tahun 2019 ini masyarakat Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi serentak. Dimana pemilihan umum (Pemilu) akan diselenggarakan secara bersamaan dengan pemilihan para calon anggota legislatif (Caleg). Tahun 2019 merupakan tahun politik bagi Indonesia, dimana pada kubu petahana Joko Widodo sebagai calon presiden akan ditemani dengan ulama besar Indonesia Ma'aruf Amin sebagai calon wakil presiden untuk lima tahun kedepan. Sementara di kubu penantang masih dengan sang mantan jenderal, Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang akan ditemani dengan sang pengusaha muda Sandiaga Uno sebagai calon wakil presidennya. Debat capres dan cawapres pun tak akan pernah luput dari perhatian masyarakat di sepanjang tahun politik ini,

dimulai dari pemaparan visi dan misi, saling melempar pertanyaan dan memberikan jawaban serta adu gagasan mengenai program-program unggulan antar kedua kubu yang seharusnya akan memberikan pengaruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk 'mantap' menentukan pilihannya dalam Pemilu pada 17 April 2019 nanti. Banyak yang menilai bahwa tak sedikit drama-drama yang ditunjukkan seakan mengalahkan drama india yang ada dan tersaji dalam proses pelaksanaan debat capres cawapres kali ini, atau bahkan tak jarang yang mengatakan seolah-olah 'analisis digantikan oleh hafalan'. Hal ini semakin menjadi ironi, ketika sudah mendapat pertanyaannya. Dimulai dari KPU yang melakukan 'blunder' yakni terkait dengan diberikannya kisi-kisi soal kepada paslon sepekan sebelum pelaksanaan. Sebanyak 20 soal yang telah disusun tim panelis diberikan kepada paslon, meskipun saat debat paslon tak mengetahui pertanyaan mana yang akan ditanyakan moderator. Pemberian kisi-kisi ini dianggap

membatasi para paslon untuk melakukan improvisasi gagasan-gagasan yang seharusnya disampaikan dengan baik ke masyarakat. Ada anggapan, akibat kisi-kisi pertanyaan itu, kedua paslon terpaku pada kertas contekan yang mereka letakkan di meja masing-masing. kisi-kisi pertanyaan yang dibocorkan membuat jawaban kedua kandidat terasa tidak orisinal. Kemampuan berpikir cepat yang seharusnya muncul pun pupus karena kandidat terpaku pada kisi-kisi jawaban yang sudah disiapkan atau bahkan pada tingkat ketajaman jawabannya dirasa kurang. Hal ini makin diperburuk dengan empat tema besar yang harus disampaikan oleh paslon hanya dalam satu kali debat dengan durasi sekira 90 menit. Waktu yang singkat ini tentu sangat menyulitkan bagi setiap paslon dan harus menjawab dengan sangat singkat dan tidak memuaskan, mengingat bahwa terdapat empat tema pada debat tersebut (hukum, HAM, korupsi, dan terorisme) yang keseluruhannya merupakan tema yang krusial. Tidak heran apabila publik resah dan khawatir bahwa debat

capres hanya sebatas seremonial semata karena semua hal yang disampaikan telah dipersiapkan terlebih dahulu. Esensi debat yang diharapkan publik untuk mengetahui secara murni capres dan cawapres tentu tercederai. Namun, setidaknya dengan debat ini publik akan diberikan sedikit gambaran mengenai karakter, arah gerak kepemimpinan, serta target yang hendak dicapai ketika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Bagi pasangan calon, agenda debat ini tentu akan menjadi ruang yang sangat tepat, tidak hanya sosialisasi program, namun juga mengkritisi agenda lawan, menunjukkan agenda lawan, menunjukkan bahwa programnya jauh lebih unggul. Disisi lain, keberlangsungan debat capres ini tentu tidak akan membawa pengaruh yang begitu signifikan bagi para pendukung yang sudah terlanjur fanatik. Bagi mereka, bagaimanapun kualitas calon yang didukungnya dalam berdebat maupun bagaimana cara, substansi maupun t a n g g a p a n d a l a m

menyampaikan sebuah gagasan, paslon yang sudah menjadi pilihannya akan tetap menjadi idola dan tak akan menggeser sedikitpun kemantapan pilihannya ketika hari pencoblosan dan pemungutan suara tiba. Meski demikian, walaupun bagaimanapun juga acara debat capres patut diapresiasi keberadaannya karena itu adalah wahana terbaik bagi setiap capres dan cawapres untuk memperkenalkan diri, memaparkan visi, program, serta unjuk kebolehan dalam berkomunikasi. Lebih dari sekedar pertunjukan, acara debat capres cawapres sudah semestinya memberi referensi kepada masyarakat tentang calon pemimpin bangsanya. Lalu apakah anda sudah menentukan pilihan?.

Pentingnya Peran Mahasiswa dalam Pesta Demokrasi

Dimas Adyaksa M.P dan Audrey kartika



Ketua Hmi FH Undip – Iran Raksa Hidayat

Pemilu serentak tahun 2019 ini sudah di depan mata, banyak calon dari berbagai fraksi yang mengirimkan calonnya untuk dicalonkan dalam kontestasi politik Pemilu ini.

Hiruk pikuk pesta demokrasi pun sudah mulai terasa sejak tahun lalu. Mulai dari berkampanye, menyusun serta menyampaikan visi dan misi hingga debat presiden dan wakil

presiden. Dewasa ini, masih banyak mahasiswa yang masih belum sadar dengan pentingnya pesta demokrasi ini. Mereka terkesan apatis dalam menyikapi pesta demokrasi ini, padahal peran mereka sangat penting dalam menentukan hak pilihnya untuk masa depan Negara, mengingat jumlah kaum milenial (dimana mahasiswa juga termasuk di dalamnya) saat ini yang sangat besar yakni sekitar 35-40% (usia 17-35) dari total jumlah pemilih di Indonesia). Menjadi pemilih muda bukanlah hal yang mudah. Perlu pendidikan politik dan sadar informasi agar pemilih muda tidak bersikap apatis terhadap Pemilu. Berkaca pada Pemilu 2004 dan 2009, situasi saat ini terlihat seolah cenderung semakin surut. Berbagai penyebab pemilih muda rawan menjadi apatis atau golput pada Pemilu, salah satunya adalah karena politik kekurangan role model yang dapat menjadi panutan bagi mereka. Kepedulian kaum muda terhadap politik sangat penting bagi kemajuan kehidupan

negara ke depan. Sudah saatnya kita sebagai anak muda tidak bergaya apatis dengan politik. Sebagai mahasiswa seharusnya kita harus benar-benar mengetahui calon-calon yang akan dipilih dalam pemilu kelak, bukan hanya sekedar tahu saja, karena pesta demokrasi ini menentukan masa depan Negara untuk 5 tahun ke depan. Perilaku negatif partai politik selama masa kampanye, ketidakpercayaan pada pemerintahan yang begitu-begitu saja, kurangnya pendidikan politik, hingga idealisme kaum muda sebagai agent of change yang semakin luntur. Itulah beberapa faktor dari apatisnya anak muda di politik. Sistem yang bobrok, tidak akan pernah berubah jika masyarakatnya juga tak ikut untuk peduli dan berubah menjadi baik. **Apa arti pesta demokrasi bagi anda sebagai mahasiswa?** Buat saya pribadi, sebagai mahasiswa atau individu, pesta demokrasi adalah tempat atau wadah kita untuk memilih pemimpin di negara kita selanjutnya ini yang mana nanti pemimpin itu juga akan

membangun Indonesia ke depannya.

Seberapa pentingnya bagi mahasiswa untuk turut ambil bagian dalam pesta demokrasi ?

Peran mahasiswa bagi demokrasi sangat penting. Mahasiswa harus mengambil peran dalam pesta demokrasi karena sejak dahulu kala mahasiswa sudah berperan sebagai roda penggerak perubahan, bahan bakar dari api revolusi sehingga mahasiswa harus berperan aktif mengawal demokrasi supaya pembangunan Indonesia ini semakin terarah untuk kesejahteraan masyarakat.

Apa yang perlu dipersiapkan oleh mereka para pemilih agar tidak salah pilih khususnya para pemula?

Bagi saya pribadi yang harus dipersiapkan adalah pengetahuan terhadap siapa yang mereka pilih, siapa paslonnya dan juga pengetahuan terhadap pentingnya suara mereka dalam membangun Indonesia sehingga ketika mereka tahu kredibilitas dan kemampuan para paslon, mereka bisa lebih paham dan

lebih siap dalam memilih dan ketika mereka mengetahui pentingnya suara mereka, mereka tidak akan melakukan golput.

Bagaimana pendapat anda terhadap angka golput yang terus meningkat di negara ini?

Saya cukup sedih dengan meningkatnya golput yang cukup signifikan karena golput itu sendiri, orang hanya memikirkan bahwa golput tidak baik, padahal sebenarnya itu berbahaya karena dengan dia golput, kebijakan-kebijakan yang seharusnya dapat dibuat lebih baik malah menjadi terhambat dan tidak berhasil karena golput. Jadi kalau perlu harus ditingkatkan lagi kesadaran masyarakat untuk memilih.

Bagaimana pendapat anda jika dikatakan golput itu adalah hak?

Kalau ditanya itu hak, ya benar itu adalah hak. Hak mereka untuk memilih dan tidak memilih, namun perlu diingat bahwa mereka tinggal di dalam negara yang mana kebijakan dan kesejahteraan negaranya bergantung pada rakyatnya itu sendiri tidak hanya pada

pemerintah. Sehingga ketika ia ingin negaranya sejahtera dan makmur, maka diperlukan peran aktif dari setiap individu. Sosok pemimpin yang baik menurut anda itu seperti apa? Pemimpin yang mampu merangkul serta mendorong masyarakatnya untuk ikut serta dalam mengawal kebijakan pemerintah dan juga dapat merangkul masyarakatnya untuk membangun negara ini. Jadi, tidak hanya serta merta pemerintah yang membangun, tetapi rakyatnya juga diajak untuk ikut serta berperan. Kita sebagai mahasiswa hukum, sesungguhnya sudah sangat kental dengan dunia politik, tapi masih banyak mahasiswa yang apatis terhadap politik. Menurut anda bagaimana cara

menumbuhkan jiwa peduli politik di kalangan mahasiswa? Untuk saat ini, menurut saya cara yang paling ampuh adalah melalui sosialisasi, baik melalui seminar maupun kampanye-kampanye di sosial media. Sosialisasi yang dimaksud disini, kontennya harus berupa kesan pentingnya politik, dan juga bahwa setiap individu itu tidak terlepas dari politik. Tidak memandang kita dari fakultas mana, karena dari fakultas mana pun kita, kita tetap tidak akan terlepas dari politik. Bagaimana pendapat anda tentang istilah 'Generasi milenial sebagai generasi yang apatis terhadap politik'? Saya kurang setuju, karena saya melihat para generasi milenial sudah mulai peduli, walaupun

belum terlalu mendalami politik tapi mereka sudah mengetahui paslon dari pemilihan presiden maupun legislatif dan juga mulai peduli terhadap politik. Cuma yang saya sayangkan, banyak juga pemuda-pemuda yang peduli politiknya itu peduli untuk tidak mengikuti atau apatis terhadap politiknya, nah itu yang perlu menjadi catatan. So far, saya melihat sekarang ini milenial sudah lebih banyak yang peduli terhadap politiknya dibandingkan yang apatis terhadap politik.



Pesona Kemegahan Kalipancur, Air Terjun Tertinggi di Ujung Selatan

Reza Aditya

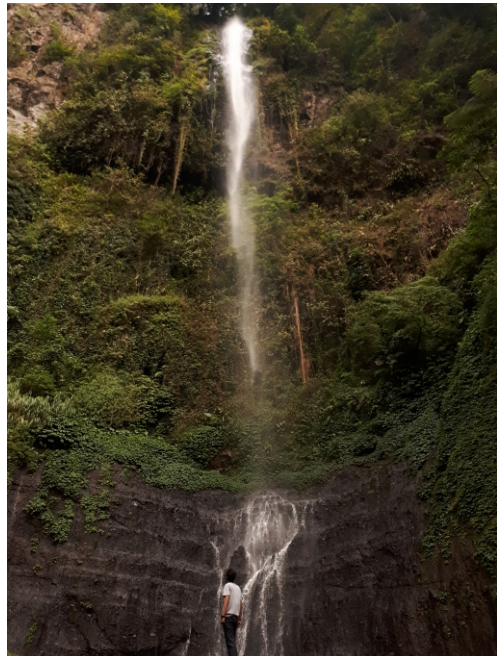
Semarang merupakan salah satu tempat yang memiliki populasi penduduk paling padat di Jawa Tengah. Tentu saja ketika mendengar nama Semarang, pasti yang terlintas dalam benak kita yaitu Ibukota Provinsi Jawa Tengah yang penuh dengan hiruk pikuk penduduknya. Begitu banyaknya gedung perkantoran, pusat perbelanjaan hingga perguruan tinggi seakan menambah Semarang cocok disebut sebagai Kota Metropolitan. Namun siapa sangka, di ujung selatan Kabupaten

Semarang terdapat satu tempat wisata yang jauh dari nuansa keramaian dan tergolong salah satu tempat asri yang belum banyak masyarakat tahu. Tempat tersebut oleh masyarakat sekitar dikenal sebagai Air Terjun Kalipancur. Benar apa yang telah disebutkan di atas bahwa Air Terjun Kalipancur terletak di daerah paling ujung selatan Kabupaten Semarang, tepatnya di kaki Gunung Telomoyo, Desa Nogosaren, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Air Terjun Kalipancur ini telah

ditemukan dan dikelola oleh masyarakat sejak puluhan tahun yang lalu. Mengingat keberadaan air terjun ini sudah lama dikelola, akses jalannya pun terbilang cukup mudah dan beraspal. Lokasi Air Terjun Lembah Kalipancur ini terletak cukup jauh dari pusat Kota Semarang atau sekitar 60 kilometer ke arah selatan. Namun cukup dekat bagi pengunjung yang berasal dari Salatiga atau berjarak sekitar 15 kilometer saja. Bagi pengunjung yang ingin menuju ke Air Terjun

Kalipancur ini disarankan untuk menggunakan kendaraan pribadi, mengingat belum tersedia kendaraan umum yang menuju ke Desa Nogosaren. Sepanjang perjalanan, pengunjung akan disuguhkan berbagai pemandangan yang sangat memanjakan mata. Perpaduan

antara dua gunung yaitu Gunung Merbabu dan Telomoyo seakan menambah keeksotisan perjalanan menuju wisata air terjun ini. Selain itu, apabila beruntung



atau cuaca sedang cerah tanpa kabut, pengunjung dapat melihat keindahan Rawa Pening dari ketjalaran yang cukup jauh menuju Desa Nogosaren, pengunjung tidak perlu khawatir karena disana terdapat palang penunjuk yang mengarahkan ke tempat parkir Air Terjun Kalipancur. Tempat parkir yang tersedia pun cukup luas untuk kendaraan roda dua maupun

empat. Tiket masuk menuju lokasi air terjun terbilang cukup terjangkau yaitu Rp 3.000,00 per orang ditambah biaya parkir Rp2.000,00 untuk motor dan Rp 4.000,00 untuk mobil. Sesampainya di tempat parkir, perlu perjuangan ekstra untuk menuju ke lokasi air terjun. Ter-

dapat sekitar hampir seribu anak tangga yang harus dilewati. Perlu waktu sekitar 20 menit untuk sampai ke lokasi air terjun. Selain itu medanyang cukup

curam mengharuskan pengunjung dalam keadaan fit sebelum lokasi, para pengunjung sudah disuguhkan berbagai pemandangan menakjubkan dari nuansa hutan pegunungan. Suara gemericik air yang berasal dari sungai-sungai kecil sepanjang turunan anak tangga menambah melodi alam yang seakan mampu sejenak melupakan penat hiruk pikuk perkotaan. Satu hal yang

paling membedakan Air Terjun Kalipancur dengan air terjun lainnya, yaitu ketika pengunjung masih berada di tengah-tengah perjalanan, pengunjung dapat melihat kemegahan dari air terjun yang menjulang tinggi. Begitu tingginya hingga para pengunjung sudah dapat menikmatinya dari kejauhan. Tentu saja bukan itu tujuan untuk mengunjungi air terjun ini. Pengunjung tentu ingin melihat langsung kemegahan sembari bermain air di bawah guyuran air terjun secara lebih dekat. Apabila merasa kelelahan, pengunjung dapat beristirahat sejenak di bawah gazebo-gazebo kecil yang tersedia di sepanjang turunan anak tangga.

Hal yang cukup disayangkan di sini yaitu tidak terdapat penjual makanan dan minuman di sepanjang jalan menuju lokasi air terjun. Hanya ada satu penjual, itupun terletak di lokasi yang berdekatan dengan air terjun. Oleh karena itu, pengunjung sangat disarankan membawa bekal sendiri apabila merasa lapar ataupun kehausan. Tapi tidak perlu khawatir bagi pengunjung yang tidak membawa bekal. Pada beberapa sisi sungai kecil sepanjang anak tangga, terdapat saluran pipa kecil dari bambu yang mengarah ke anak

tangga. Air dari sungai tersebut berasal dari mata air langsung yang tersebar luas di Gunung Telomoyo dan Merbabu. Tentu saja tujuan dibuatnya pipa tersebut yaitu untuk memudahkan pengunjung mengambil air jika mereka merasa kehausan.

Pun ketika pengunjung merasa gerah karena perjalanan yang cukup melelahkan ditambah dengan cuaca Semarang yang panas, terdapat satu spot pemandian yang bersumber langsung dari mata air Telomoyo. Pemandian ini terletak di pertengahan jalan menuju lokasi air terjun. Pada tempat pemandian ini, terdapat keunikan tersendiri di dalamnya. Dari kejauhan sekilas nampak seperti bangunan biasa yang di tutup dengan pagar kecil. Jauh dari kesan tempat pemandian memang, namun apabila pengunjung memasuki bangunan tersebut terdapat satu kolam sedang yang hanya cukup untuk berendam saja. Pada sekitar kolam pemandian tersebut, terdapat juga patung dan relief kuno yang seakan menambah suasana seperti pada zaman kerajaan.

Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, semua rasa lelah seakan terbayarkan ketika menyaksikan gemericik air dari

salah satu air terjun tertinggi di Jawa Tengah. Berdasarkan penuturan dari penduduk setempat sekaligus penjual makanan di dekat lokasi, Air Terjun Kalipancur memiliki ketinggian sekitar 100 meter. Berdasarkan ketinggian itu, banyak disebut-sebut bahwa Air Terjun Kalipancur ini menjadi air terjun tertinggi di Semarang.

Wisata air terjun ini terbilang tidak cukup ramai dikunjungi oleh masyarakat. Rata-rata pengunjung berkunjung pada libur akhir pekan, itu pun hanya berkisar sekitar 20-50 orang per harinya. Pada hari-hari biasa, wisata ini sangat jarang dikunjungi atau bahkan tidak ada pengunjung sama sekali. Tentu saja hal ini menandakan bahwa tempat wisata Air Terjun Kalipancur ini belum banyak masyarakat yang mengetahui keberadaannya. Tempatnya yang terpencil membuat penyebaran berita tentang keberadaannya cukup sulit untuk sampai di telinga masyarakat perkotaan.

Bagi anda yang memiliki hobi travelling, Air Terjun Kalipancur ini sangat cocok dijadikan destinasi utama untuk menambah koleksi foto maupun footage video. Pesona keindahan alamnya seakan menjadi primadona bagi fotografer

manapun. Namun untuk mendapatkan hasil foto dan video lebih baik, saat menuju ke wisata ini sangat disarankan untuk berkunjung pada musim penghujan karena pada saat itu debit air terjun sangat deras. Berbeda dengan saat musim kemarau. Debit air akan semakin menipis atau bahkan air yang jatuh sudah habis sebelum sampai di bawah. Meskipun begitu, pengunjung sangat dilarang untuk menuruni anak tangga menuju lokasi apabila hujan deras sedang mengguyur mengingat akses yang cukup curam dan licin.

Perlu diketahui bahwa kawasan wisata air terjun ini masih dikelola secara swadaya oleh masyarakat sekitar. Menurut penuturan salah satu warga, penjagaan tiket masuk dikerjakan secara bergilir oleh setiap keluarga. Maka dari itu, sangat besar harapan untuk pemerintah daerah dapat mengelola kawasan air terjun ini sehingga nanti kedepannya dapat berkembang lebih baik lagi serta mampu membuka peluang lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Suara Milenial Suara Penentu Arah Demokrasi Bangsa

Fitria Ningsih

Sebentar lagi, Indonesia akan merayakan pesta demokrasi yaitu Pemilihan Umum. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilu juga salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, public relations, komunikasi massa, lobby dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator politik.

Namun ada hal yang menarik dibahas dalam kontestasi politik ini, yaitu pemilu serentak yang dilaksanakan pada 17 April 2019 nanti. Selain itu, ada kaitannya dengan hak pilih generasi milenial yang menjadi sasaran empuk bagi para elit politik. Karena dari suara generasi milenial juga akan menjadi penentu arah demokrasi Indonesia ke depan dalam pemilu yang akan dilaksanakan. Jumlahnya yang signifikan sebenarnya bisa memberikan kontribusi besar bagi bangsa ini. Oleh karena itu, segala upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam memberikan hak pilih. Artinya hak suara dari generasi milenial ini sangat penting dan krusial.

Berbicara tentang milenial, maka timbul pertanyaan bahwa sebenarnya siapakah milenial dan seberapa besar pengaruhnya?. Berdasarkan survei LSI, memperkirakan ada 40-50 persen pemilih masuk kategori milenial pada Pemilu 2019. Mereka yang termasuk kategori milenial, yakni pemilih pemula dan pemilih muda. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi pernah mencatat bahwa jumlah pemilih pemula pada pemilu 2019 mencapai kisaran 14 juta. Jika merujuk pada kategorisasi milenial adalah mereka yang lahir antara 1980-an dan 2000-an oleh karena itu jumlahnya lebih banyak. Pemilih dalam kategori ini termasuk pada usia 35 tahun dan bahkan 40 tahun.

Berikut ini beberapa pendapat mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro mengenai pentingnya hak pilih yang akan mereka gunakan nanti:



Menggunakan hak pilih sebagai masyarakat Indonesia itu sangat penting, karena pada zaman dahulu kita tidak bisa mengontrol siapa yang akan menjadi kadidat dalam pemilu dan siapa yang akan menang, namun sekarang dengan sistem "*one man one vote*" itu kita bisa menentukan pilihan yang sesuai dengan hati nurani kita. Kita bisa mengontrol kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah nantinya. Mungkin buat kalian yang masih ragu dalam memilih alangkah baiknya Pakailah hak pilih kalian karena itu akan menentukan indonesia kedepannya.

**MUHAMMAD FEBRIAN SYUKUR
(MAHASISWA ANGKATAN 2018)**



**ANGGARDHA PARAMITA PRASTUTI
(MAHASISWA ANGKATAN 2017)**

Perwujudan Indonesia sebagai negara demokrasi adalah salah satunya dengan turut andil dalam pemilu dan menggunakan hak suaranya, karena satu suara itu sangat penting. Saya pribadi akan memanfaatkan hak suara saya meskipun hanya satu tapi juga berpengaruh untuk menentukan siapa pemimpin bangsa ini. Mungkin nanti dari yang saya pilih menang, ini juga merupakan konsekuensi dari siapa yang telah saya pilih, entah itu mereka mengalami kegagalan atau hambatan dalam masa pemerintahannya. Tujuannya agar kita tidak semerta-merta menghujat mereka tetapi juga memberikan kritik yang membangun. Untuk warga Indonesia yang baik gunakanlah hak pilih anda karena golput itu bukan pilihan.



VALEN SUBEKTI (MAHASISWA ANGKATAN 2016)

Pemilihan umum merupakan suatu ajang bagi kita rakyat Indonesia untuk memilih calon pemimpin bangsa yang memiliki kapabilitas. Karena mereka yang akan menentukan kemana arah bangsa ini mau dibawa dan melakukan perubahan untuk bangsa yang lebih baik. Begitu pula dengan hak suara masyarakat, ini sangat menentukan siapa kandidat yang akan menang nantinya. Saya pribadi masih ragu untuk menggunakan hak pilih saya dikarenakan suatu hal yang berkaitan dengan administrasinya bukan karena saya golput. Sebenarnya menggunakan hak pilih masyarakat dibebaskan mau memilih siapapun yang sesuai dengan pandangan mereka dan juga bebas untuk tidak memilih, tetapi alangkah baiknya kita menggunakan hak pilih tersebut dengan sebaik-baiknya tanpa paksaan dari siapapun. Pesan saya buat teman-teman Fakultas Hukum gunakanlah hak pilihmu dan pilihlah calon pemimpin yang berkompeten!.

NADIA SAFITRI (MAHASISWA ANGKATAN 2016)



Hak pilih itu sangat penting karena kalau bukan kita siapa lagi yang akan memilih, kita sebagai rakyat, kita yang menilai, mengerti dan juga bisa memahami. Toh satu suara itu menentukan 1 periode ke depan. Jadi saya akan menggunakan hak pilih ini dengan bijaksana. Selain itu, juga merupakan kali kedua saya ikut andil dalam pesta demokrasi. Dan sedikit pesan dari saya untuk teman-teman semua kalau bisa jangan sampai golput karena negara kita negara demokrasi yang sudah diperjuangkan dulunya. Kini kalian bebas dalam memilih calon pemimpin yang sesuai dengan visi dan misi kalian juga.

Hak suara merupakan hak yang diberikan kepada orang-orang yang sudah memenuhi syarat secara administratif untuk memberikan suara agar turut andil dalam memilih calon pemimpinnya. Apalagi sebagai generasi milenial hak pilih ini sangat penting untuk digunakan dan cukup berpengaruh untuk nasib Indonesia selanjutnya, karena apa yang kita suarakan itu, 5 menit kita di TPS mampu mengubah wajah Indonesia 5 tahun kedepannya. Sebagai warga Indonesia yang baik gunakan hak pilih kalian dengan sebaik mungkin karena yang akan kalian pilih nanti itu juga bakal menyejahterakan kalian.

MUHAMMAD IQBAL RAMADHAN (MAHASISWA ANGKATAN 2015)



FAKTA-FAKTA UNIK PEMILU 2019

Pesta Demokrasi sudah ada di depan mata. Pesta demokrasi ini ditunggu karena digelar setiap lima tahun sekali. [Pemilu 2019](#), yang digelar untuk memilih presiden, wakil presiden serta anggota legislatif akan digelar serentak pada tanggal 17 April 2019. Setiap diadakan pemilu per lima tahun sekali, ada saja keunikan tiap tahunnya. Tahapan formal Pemilu 2019 yang meliputi pemilihan presiden dan wakilnya, anggota DPR, DPRD serta DPD resmi dimulai dengan kampanye dan akan berpuncak pada hari pencoblosan. Berikut ini adalah fakta-fakta unik terkait Pemilu yang akan diselenggarakan tahun ini:

- Pertama kalinya pemilihan presiden dan pemilihan para anggota legislatif dilakukan serentak.
- Biaya penyelenggaraan Pemilu 2019 ini dianggarkan sebesar 24,8 triliun rupiah. Ini meningkat sekitar 700 miliar dibandingkan Pemilu 2014, yang

diselenggarakan dengan biaya 24,1 triliun.

- Di antara 16 partai yang bertarung, terdapat empat partai baru. Yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya, partai Garuda, dan Perindo.
- Yang akan dipilih kali ini, sepasang presiden dan wakil presiden, 575 anggota DPR RI, 136 anggota DPD, 2.207 anggota DPR Provinsi dan 17.610 anggota DPRD Kota/Kabupaten.
- Jumlah pemilih tetap Pemilu 2019 capai 192.828.520 pemilih. Dari jumlah tersebut, sebanyak 190.770.329 merupakan pemilih di dalam negeri. Sedangkan pemilih di luar negeri sebanyak 2.058.191 pemilih. Jumlah pemilih luar negeri ini tersebar di 130 perwakilan RI di seluruh dunia.
- Di antara ribuan calon, terdapat 38 mantan

terpidana kasus korupsi. Yang paling dikenal adalah M Taufik, Ketua DPD partai Gerindra Jakarta, yang juga sedang dalam proses untuk menjadi wakil gubernur Jakarta menggantikan Sandiaga Uno yang mundur untuk maju sebagai calon wakil presiden bersama Prabowo selaku calon presidennya.

Lima kertas suara dalam lima warna merupakan keunikan lain yang ada pada Pemilu 2019. Anda akan disodori kertas yang cukup banyak untuk pemilu ini, yakni untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR-RI, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD. Kecuali DKI Jakarta, yang hanya empat kertas suara tanpa DPRD kota/kabupaten.